

SKRIPSI

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
PEDESAAN DI DESA BAKARU KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN PINRANG**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Ilmu Politik

Pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin



DI SUSUN DAN DI AJUKAN OLEH :

HAJRA

E041191073

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN
EKONOMI PEDESAAN DI DESA BAKARU KECAMATAN LEMBANG
KABUPATEN PINRANG**

Yang Diajukan Oleh :

HAJRA

E041191073

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama


Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si.
NIP. 197912182008122002

Pembimbing Pendamping


Haryanto, S.IP., M.A.
NIP. 198610082019031009

Mengetahui,
Ketua Departemen Ilmu Politik


Drs. H. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.
NIP. 19621231 199003 1 023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAJRA

NIM : E041191073

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Program Studi : ILMU POLITIK

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "***Collaborative Governance*** Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan Di Desa Bakaru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang" adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 20 November 2023



HAJRA

ABSTRAK

HAJRA. NIM E041191073. Collaborative Governance Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan Di Desa Bakaru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Di bawah bimbingan Ibu Dr. Sakinah Nadir, S.IP.,M.Si dan Bapak Haryanto, S.IP.,M.A.

Salah satu fungsi pemerintah adalah mengadakan atau melakukan pemberdayaan Masyarakat ekonomi desa didasarkan dengan adanya peraturan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014. Tujuan dari Pembangunan ekonomi desa yaitu untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang mandiri, Masyarakat kreatif dan memiliki penambahan angka pendapatan ekonomi.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisa bentuk proses *collaborative governance* terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bakaru dalam Pembangunan ekonomi desa sebagai Upaya peningkatan ekonomi didesa Bakaru. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi sebagai tahapan awal penelitian, wawancara mendalam terhadap beberapa informan, serta dokumentasi sebagai data pendukung saat dilapangan. Penelitian ini diuji dengan teori *Collaborative Governance* Ansell dan Gash tentang proses kolaborasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya dari pemerintah desa, Pengurus BUMDes, pihak swasta dan juga Masyarakat dalam mengelola BUMDes telah berhasil. Pemerintah desa menjalankan tugasnya dengan baik melalui tahapan kolaborasi dialog tatap muka, Membangun Kepercayaan, Komitmen terhadap proses, Pemahaman Bersama dan Hasil Sementara hingga menunjukkan hasil kolaborasi BUMDes yang sesuai dengan harapan. Program kerja yang dibentuk dan dijalankan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat serta menunjukkan hasil peningkatan ekonomi yang dirasakan oleh Masyarakat serta des aitu sendiri. Hal tersebut harus selalu dipertahankan agar Desa Bakaru bisa merubah status social dari desa tertinggal menuju desa berkembang dari segi perekonomiannya.

Kata kunci: collaborative governance, Pembangunan ekonomi desa, peningkatan ekonomi desa

ABSTRACT

HAJRA. NIM E041191073. Collaborative Governance in Rural Economic Development in Bakaru Village, Lembang District, Pinrang Regency. Under the guidance of Mrs. Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si and Mr. Haryanto, S.IP., M.A.

One of the government's functions is to organize or empower village economic communities based on the Village-Owned Enterprises (BUMDes) regulations in the 2014 Law of the Republic of Indonesia. The aim of village economic development is to create an independent economic environment, creative communities and have additional economic income figures.

The aim of this research is to determine and analyze the form of a collaborative governance process for the management of Bakaru Village-Owned Enterprises (BUMDes) in village economic development as an effort to improve the economy in Bakaru village. The research method used is descriptive research with a qualitative approach. The data collection techniques used were observation as the initial stage of research, in-depth interviews with several informants, and documentation as supporting data in the field. This research was tested with Ansell and Gash's Collaborative Governance theory regarding the collaboration process.

The results of this research show that the efforts of the village government, BUMDes administrators, the private sector and also the community in managing BUMDes have been successful. The village government carries out its duties well in every BUMDes collaboration process. The work program is formed and implemented in accordance with the needs of the community and shows the results of economic improvement felt by the community and the village itself. This must always be maintained so that Bakaru Village can change its social status from a backward village to a developing village in terms of its economy.

Keywords: collaborative governance, village economic development, improving the village economy

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbilamin Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala keberkahan, karuniah serta nikmat kehidupan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Collaborative Governance Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan Di Desa Bakaru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang**”. Salam dan shalawat juga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi panutan penulis menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat wajib sebagai mahasiswa strata satu (S1), untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Segala bentuk masukan, kritik dan saran yang membangun masih sangat dibutuhkan. Banyak rintangan dan tantangan yang penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini namun berkat segala bantuan tenaga dan doa dari semua pihak yang menemani perjalanan penulis, sehingga skripsi ini terselesaikan. Maka pada kata pengantar ini, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat tanpa terkecuali.

Selain itu terimakasih yang setinggi-tingginya penulis tujukan kepada kedua orang tua penulis, **Bapak Syahril** dan **Ibu Dalle** yang telah memberikan kasih sayang yang begitu tulus. Skripsi ini penulis persembahkan kepada dua mukjizat yang tuhan kirimkan kepada penulis melalui sosok orang tua yang senantiasa

menjadi peluk terhangat bagi penulis. Dua orang malaikat gagah dan cantik yang tak pernah berhenti memberikan dukungan moral dan material yang tak lupa diiringi do'a disetiap sujudnya. Kepada kakak tercinta, Kak Hadira, Kak Misbah, Kak Hawira, Kak Hariani, terimakasih atas segala dukungan moral serta material selama ini, tidak lupa untuk adik satu-satunya bagi penulis Almh. Hadra, terimakasih telah membersamai selama 16 (enam belas) tahun kehidupannya. Semoga penulis dapat menjadi anak yang membanggakan untuk kedua orang tua dan juga kepada semua keluarga besar penulis.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Sakinah Nadir, S.IP.,M.Si selaku pendamping akademik (PA) sekaligus dosen pembimbing 1 dan Bapak Haryanto, S.IP, M.A. selaku dosen pembimbing 2 yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis menyusun skripsi ini.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas keberhasilan penulis dalam penyusunan skripsi ini kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang telah memberikan perubahan-perubahan positif bagi sistem pendidikan di Universitas Hasanuddin.
2. Bapak **Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si**, selaku Dekan FISIP UNHAS yang telah banyak membantu dan memberi ruang pada penulis selama

menempuh perkuliahan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin.

3. Bapak **Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D**, selaku Ketua Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan banyak kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan administrasi di Departemen Ilmu Politik.
4. Seluruh dosen-dosen Program Studi Ilmu Politik : **Bapak Prof. Dr. Muhammad, M.Si, Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Bapak Prof. Dr. H. Basir Syam, M.Ag (Alm), Bapak Drs. A. Yakub, M.Si, Bapak Dr. Muhammad Saad, MA, Bapak Andi Naharuddin, S.IP, M.Si, Bapak Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si, Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si, Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si, Ibu Dr. Ariana Yunus M.Si, Bapak Imran, S.IP, M.Si, Ibu Dr. Sakinah Nadir, S.IP, M.Si, Ibu Ummi Suci Fathya Bailusy, S.IP, M.Si, Kakak Zulhajar, S.IP, M.Si, dan Kakak Dian Ekawati, S.IP, M.Si** yang telah memberikan banyak ilmu, saran, dan arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
5. Seluruh pegawai dan staf fakultas serta staf dan pegawai departemen ilmu politik , **Bapak Syamsuddin. S.T.**, dan **Ibu Musriati, S.E.**, yang senantiasa membantu penulis dalam urusan-urusan administrasi akademik.
6. Terima Kasih untuk Informan utama penulis **Bapak Alimuddin, S.IP, Bapak Sadarullah, Bapak Manyur, S.T, Ibu Siarah, Ibu Harmiati, Kak**

Rahmatullah, S.M, Kak Syukur yang telah meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukan masing-masing.

7. Terima kasih untuk keluarga besar **KMP-Unhas** telah menjadi rumah dan tempat belajar serta memberikan penulis keluarga baru di Makassar.
8. Terima kasih untuk keluarga besar **Himapol FISIP Unhas** yang telah memberikan pengalaman luar biasa kepada penulis selama berorganisasi di kampus.
9. Kepada teman-teman **Politik dan Diplomasi 2019** yang telah kebersamai penulis sedari awal menjadi mahasiswa sampai saat ini.
10. Kepada teman-teman **Amazing 2019** yang telah menjadi saudara seadanya diluar maupun didalam kampus.
11. Kepada teman-teman **KKN Gel-108 Posko 17 Desa Mangkawani** terimakasih atas canda, tawa, duka, serta semua pelajaran hidup yang penulis dapatkan.
12. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada kakak senior **Anwar, S.IP** yang telah membagi ilmu serta pengalamannya selama menjadi mahasiswa Ilmu Politik
13. Terima kasih sebesar-besarnya kepada teman tercinta dan teman paling setia **Wiwik Alfitahul Jusram** dan **Andi Irdyanti** atas kebersamaannya selama ini. Terimakasih sudah menjadi saudara tak sedarah yang selalu ada.
14. Terima kasih kepada teman baik dalam segala hal **Rostina** dan **Adiva** yang telah memberikan tambahan ilmu bagi penulis.

Selebihnya terimakasih dan mohon maaf kepada seluruh teman-teman yang terlupa dan tak bisa penulis tuliskan satu persatu yang pernah membantu dan berkenalan dengan penulis selama ada dikota perantauan Makassar. Sesungguhnya kalian tetap teringat sebagai sejarah dalam penulis menjadi mahasiswa. Akhhirnya penulis menyadari atas segala kekurangan yang terdapat pada skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 29 Oktober 2023

Penulis

HAJRA

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENERIMAAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iii
ABSTRACK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
2.1. Rumusan Masalah.....	8
3.1. Tujuan Penelitian.....	8
4.1. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
1.2. Penelitian Terdahulu.....	10
2.2. <i>Collaborative governance</i>	15
3.2. Pembangunan Ekonomi Pedesaan	20
4.2. Kerangka Berpikir	24
4.2. Sekma Pikir	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
1.3. Lokasi Penelitian	27
2.3. Pendekatan dan Tipe Penelitian	27
3.3. Teknik Pengumpulan Data	28
4.3. Informan Penelitian.....	30
5.3. Teknik Analisis Data	32
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	35
1.4. Gambaran Umum Desa Bakaru	35
2.4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bakaru	39

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
1.5. Kolaborasi Tata Kelola BUMDes Bakaru	42
2.5. Pembangunan Ekonomi Desa Bakaru	60
BAB VI PENUTUP	78
1.6. Kesimpulan	78
2.6. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN	85

DAFTAR TABEL

4.3.1 Daftar Informan Penelitian

1.4.1. Data Kependudukan Desa Bakaru Desember 2022

2.5.1. Rekap Keuangan *Wifi* BUMDes Bakaru Periode I

2.5.2. Rekap Keuangan *Wifi* BUMDes Bakaru Periode II

2.5.3. Rekap Keuangan *Wifi* BUMDes Bakaru Periode III

2.5.4. Rekap Keuangan *Wifi* BUMDes Bakaru Periode IV

2.5.5. Rekap Keuangan Air Bersih BUMDes Periode I

2.5.6. Rekap Keuangan Panen Periode I Pertanian Jagung Kuning

2.5.7. Rekap Keuangan Panen Periode II Pertanian Jagung Kuning

DAFTAR GAMBAR

2.5.1. Dokumentasi Salah-satu *Wifi* Yang Terpasang Dirumah Warga

2.5.2. Dokumentasi Hasil Program Pengaliran Air Bersih

2.5.3. Dokumentasi Antrian Pembelian Benih Jagung dan Pupuk Jagung

2.5.4. Dokumentasi Praktik Pengolahan Hasil Pertanian Jagung Kuning

2.5.5. Dokumentasi Praktik Pengolahan Sampah Domestik

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Potensi ekonomi desa menjadi sangat penting untuk pembangunan ekonomi negeri saat ini. Memberikan perhatian yang besar pada pertumbuhan ekonomi desa merupakan salah satu langkah awal dalam upaya meningkatkan kualitas ekonomi di seluruh pelosok negeri. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, pemerintah tengah gencar mendorong pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah melakukan hal tersebut dengan cara melalui beberapa program yang ditujukan ke desa-desa. Tujuan tak lain adalah untuk pemerataan pembangunan dan ekonomi sebagai wujud dari nilai yang terkandung di dalam UUD 1945.

Membangun ekonomi desa sama halnya dengan mendirikan ekonomi desa. Masyarakat desa bisa sejahtera dan pemerintah desa bisa menjadi pelayan dan penggerak ekonomi desa. Membangun ekonomi pedesaan harus melalui proses dimana pemerintah desa dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah desa dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi pedesaan adalah untuk menciptakan suatu lingkungan ekonomi desa yakni menciptakan suatu

lingkungan yang memungkinkan masyarakatnya dapat menikmati kehidupan yang kreatif sehat dan juga memiliki angka harapan hidup yang tinggi.

Konsep pembangunan ekonomi desa harus benar-benar bertumpu pada kekuatan masyarakat desa. Potensi yang dimiliki oleh desa harus benar-benar menjadi akar dalam pembangunan ekonomi desa. Potensi sumber daya alam dan manusia yang ada di desa harus menjadi sumber kekuatan dalam membangun ekonomi desa. Untuk penguatan pembangunan ekonomi desa maka dibutuhkan kerjasama yang baik antara pusat pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang bersinergi sebagai kebutuhan yang ada di desa.

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa berperan sebagai agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran tetap yang hendak disejahterakan, yang bisa wujudkan dengan membentuk suatu program yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana sesuai dengan permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa, yang menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.¹ Pemerintah pusat telah memberi hak dan wewenang kepada pemerintah daerah atau biasa disebut dengan Desentralisasi/otonomi daerah, bahwa

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota telah diberi kewenangan konkuren berupa hak untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya yang diharapkan mampu mewujudkan pemerataan pembangunan di setiap daerah sehingga terciptanya masyarakat yang sejahtera. Setelah dikeluarkannya kebijakan dalam undang-undang nomor 39, banyak desa-desa yang mulai membentuk dan menerapkan program BUMDes sebagai upaya pembangunan ekonomi desa. Salah satu desa yang menerapkan program tersebut yaitu Desa Bakaru yang ada di Kabupaten Pinrang.

Desa Bakaru merupakan sebuah desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Lokasi Desa Bakaru terletak di area pegunungan yang jauh dari hiruk pikuk wilayah perkotaan Kabupaten Pinrang dan belum terjangkau oleh jaringan internet serta akses jalan yang tidak memungkinkan untuk kendaraan roda empat secara terus menerus. Desa Bakaru yang terletak di area pegunungan mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah, dimana mayoritas warga desa Bakaru sangat menggantungkan hidupnya pada ketersediaan sumber daya alam tersebut. Sebagai contoh mayoritas warga desa disana bekerja sebagai petani.

Desa Bakaru memerlukan pembangunan ekonomi desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta menanggulangi kemiskinan desa dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pemberdayaan masyarakat desa,

pengembangan potensi dan ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Penghasilan masyarakat desa sebagai penunjang perekonomian didesa Bakaru memerlukan inovasi-inovasi baru. Seperti fakta dalam kegiatan kunjungan lapangan yang disampaikan oleh badan pengawas pemerintah desa Kecamatan Lembang bahwa desa Bakaru tercatat sebagai salah satu desa yang masih memerlukan pembangunan ekonomi. Badan pengawas menilai bahwa pendapatan masyarakat bergantung dari hasil jerih payah dan inovasi yang bersifat individual. Hal tersebut terjadi karna tidak adanya program tersedia yang dibentuk oleh pihak pemerintah desa sebagai bahan acuan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian. Tak hanya membahas tentang perekonomian masyarakat, badan pengawas tersebut juga menyinggung tentang pendapatan desa yang bergantung pada pencairan dana desa. Dana pembangunan infrastruktur desa dalam taraf kecil bisa juga bersumber dari pendapatan hasil pemanfaatan sumber daya desa sendiri. Maka untuk menghasilkan pendapatan desa secara mandiri maka dari jajaran badan pengawas menyarankan pembentukan program BUMDes untuk desa Bakaru. Atas kunjungan badan pengawas, pemerintah desa mulai merancang dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program BUMDes. Sehingga pada tahun 2022 BUMDes Bakaru resmi terbentuk.

Program BUMDes yang telah dibentuk oleh pemerintah desa Bakaru memiliki maksud dan tujuan agar dapat meningkatkan pendapatan asli

masyarakat dan pendapatan asli desa dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam serta kondisi lingkungan perumahan masyarakat. Program tersebut sejalan dengan bunyi Undang-Undang tentang Desa bahwa desa diberi wewenang untuk mengurus dan juga mengatur urusan pemerintahannya sendiri, sesuai dengan hak asal usul serta kepentingan dalam masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat sesuai dengan hak tradisional atau adat dan budaya yang diakui oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Sejak dibentuknya pada tahun 2022, BUMDes Bakaru nampak berhasil menunjukkan beberapa perbedaan sebelum dan sesudah dibentuk. Perbedaan tersebut dapat dilihat secara signifikan dari program pertama yang berhasil dibentuk oleh BUMDes yaitu program Desa Digital atau pemasangan *Wifi* ke pelosok-pelosok desa yang belum terakses jejaring internet. Seperti yang diketahui, desa Bakaru tercatat sebagai salah satu desa tertinggal di Provinsi Sulawesi Selatan yang belum terakses oleh jaringan internet karena letak geografis desa tersebut yang berada di area pegunungan. Setelah masuknya program Desa Digital oleh BUMDes, masyarakat desa Bakaru sudah dapat menikmati akses jaringan internet tanpa harus turun ke area perkotaan. Penjelasan tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebelum dan sesudah terbentuknya BUMDes di desa

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Bakaru. Program ini juga berhasil meningkatkan pendapatan asli desa melalui omset penjualan *Wifi*.

Selain program Desa Digital, BUMDes Bakaru memiliki dua program lain yang dijalankan yaitu program pertanian jagung kuning dan pengaliran air bersih untuk masyarakat desa. Perlu diketahui bahwa program BUMDes Bakaru terbilang masih sedikit dibandingkan dengan program-program desa lain yang memiliki potensi sumber daya alam dan kondisi lingkungan yang sama. Seperti yang terjadi pada sector pertanian, BUMDes belum mampu merambat ke bidang pertanian lain selain jagung kuning. Padahal potensi pemanfaatan sumber daya alam desa Bakaru terbesar bisa bersumber dari sector pertanian. Dari program tersebut akan muncul pertanyaan tentang bagaimana pola hubungan atau proses kolaborasi dan komunikasi yang terjadi pada lingkup BUMDes sebagaimana tujuan didirikannya yaitu untuk meningkatkan pembangunan ekonomi desa Bakaru.

Kebijakan pembentukan program BUMDes sebagai pembangunan ekonomi desa Bakaru dalam mencapai tujuan dan strategi yang telah disusun oleh aparat pemerintah desa maka diperlukan tata kelola manajemen dan kerjasama yang baik antara pemerintah desa beserta orang-orang yang ditunjuk sebagai pihak pengelola BUMDes. Peran pihak swasta dalam memfasilitasi program-program dalam BUMDes dan tidak lepas dari partisipasi masyarakat. Karena pada dasarnya kebijakan pembentukan program BUMDes didesa ini ditujukan kepada masyarakat.

Dalam proses menjalankan BUMDes, melibatkan banyak *stakeholder* agar dapat dikelola dengan system pengelolaan yang baik. Mengingat pentingnya pengelolaan terkait pembangunan ekonomi dipedesaan maka pembangunan ekonomi desa hendaknya dicarikan suatu model dan pendekatan yang cocok dengan situasi dan kondisi masyarakat di pedesaan. Dalam studi kasus tentang penelitian ini maka peneliti mencoba menggunakan salah satu konsep pendekatan yaitu pendekatan *collaborative governance*. Sebagaimana *collaborative governance* merupakan proses tata kelola yang digunakan oleh organisasi atau kelompok untuk mengatasi permasalahan yang muncul.

Penjelasan diatas dapat menjadi kesimpulan mengapa penulis tertarik meneliti dan mengangkat judul “*Collaborative Governance* dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan Di Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang”. Proses kolaborasi penelitian ini dianalisa menggunakan konsep pendekatan *collaborative governance* Ansell dan Gash. Sebagaimana Ansell dan Gash mendefinisikan *collaborative governance* sebagai sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau aset

public.³ *Collaborative governance* membangun Kerjasama antara pemerintah desa dengan pihak swasta yang memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan saling menguntungkan melalui Kerjasama kedua belah pihak. Selanjutnya pemerintah desa bekerja sama dengan masyarakat atau suatu organisasi yang ada didesa dalam pengelolaan program-program Kerjasama anantara pemerintah dan pihak swasta guna mendorong penguatan dan pembangunan ekonomi pedesaan.

2.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: Bagaimana kolaborasi tata Kelola BUMDes dalam pembangunan ekonomi pedesaan di Desa Bakaru, Kabupaten Pinrang?

3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bentuk kolaborasi tata Kelola BUMDes pemerintah desa dengan masyarakat, pemerintah desa dengan pihak swasta, dan masyarakat dengan pihak swasta dalam pembangunan ekonomi pedesaan di Desa Bakaru, Kabupaten Pinrang.

³ La Ode Syaiful Islamy H., *Collaborative Governance Konsep Dan Aplikasi* (Baubau: Deepublish, 2018), Hal. 81

4.1. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan dalam Ilmu Politik tentang konsep *Collaborative Governance* dalam pembangunan pedesaan yang melibatkan *stakeholder* yang diantaranya sang aktor politik desa beserta jajaran aparat pemerintah desa, masyarakat dan pihak swasta sebagai bentuk kolaborasi guna mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam kinerja program BUMDes agar bisa terealisasi atau diterapkan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan dan ingin dicapai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini akan lebih memperjelas dari segi aspek teoritis tentang pembahasan singkat sebelumnya. Secara konseptual akan dijelaskan pokok-pokok pembahasan, poin-poin yang memiliki hubungan dengan pokok penjelasan serta hal-hal yang akan berkaitan dengan hasil penelitian. Poin-poin tersebut berupa 1.2) Penelitian Terdahulu; 2.2) *Collaborative Governance*; 3.2) Pembangunan Ekonomi Pedesaan; 4.2) Kerangka berpikir; 5.2) Skema Berpikir.

1.2. Penelitian Terdahulu

1. Chamid Sutikno, Lupita Aliantika Sari dan Ajis Setiawan (2022) dalam jurnal hasil penelitiannya yang berjudul "*Collaborative Governance Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga*" yang fokus penelitiannya merujuk kepada aspek model bentuk *collaborative governance* yang tertuju pada BUMDes Makmur Sejahtera Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini menggunakan aspek proses *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (*Starting Condition, Facilitative Leadership, Institutional Design, The Collaborative Process*). Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa pelaksanaan *Collaborative Governance* pada BUMDes dalam proses pengembangannya

melibatkan unsur-unsur masyarakat dimulai dari pemerintah desa, BPD, masyarakat dan unsur masyarakat lainnya berjalan dengan optimal dan sesuai dengan proses teori *Collaborative Governance*, namun belum ada proses kolaborasi dengan pihak eksternal atau swasta yang tergabung dalam pengembangan BUMDes Makmur Sejahtera. Hal tersebut dikarenakan prinsip dari BUMDes dan unsur masyarakat Desa Serang memprioritaskan pada pemberdayaan masyarakat lokal, namun tidak adanya pihak swasta menjadikan kolaborasi yang dilakukan dengan semua pihak dari unsur komponen masyarakat dan dapat berjalan dengan maksimal dan mampu mengembangkan BUMDes Makmur Sejahtera secara mandiri dan efektif.

2. Arini Permatasari (2023) dalam jurnalnya yang berjudul "*Collaborative Governance BUMD Desa Margaasih Kabupaten Bandung*" membahas mengenai kolaborasi masyarakat terhadap badan usaha milik daerah dalam meningkatkan keberadaan Bumdes di Desa Margaasih. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh desa dan BUMDes melakukan sosialisasi dan memberikan pelatihan usaha kepada masyarakat yang sudah memiliki usaha, dan baru memulai usaha, serta mengingatkan untuk membayar pinjaman serta harapan agar tumbuhnya kesadaran masyarakat atau pelaku usaha dalam kewajiban membayar pinjaman, juga kesadaran masyarakat tentang BUMDes yang membuat masyarakat menjadi memanfaatkan

peluang adanya usaha dengan bantuan daripada Bumdes itu sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash dalam Syaiful Islamy di mana terdapat lima indikator yaitu *Face To Face* (Dialog Tatap Muka), *Trust Building* (Membangun Kepercayaan), *Commitment To Process* (Komitmen Terhadap Proses), *Share Understanding* (Pemahaman Bersama), *Intermediate Outcomes* (Hasil Antara).

3. Vindi Oktaviani (2022) dalam jurnal hasil penelitiannya yang berjudul "*Collaborative Governance dalam Pengelolaan Bumdes sebagai Upaya Penguatan Ekonomi Desa di Kabupaten Klaten*" yang memfokuskan penelitian pada BUMDes dengan kategori maju dan berkembang dengan mengambil sampel masing-masing 1 BUMDes dengan kriteria memiliki sumber daya alam yang sama. Studi ini menekankan pada bagaimana pola kolaborasi yang terjalin dengan membandingkan sampel BUMDes untuk mengetahui bagaimana seharusnya BUMDes dikelola. Untuk itu peneliti bermaksud melihat bagaimana kolaborasi yang terjalin pada BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok sebagai sampel dari BUMDes kategori maju dan BUMDes Janti Jaya Desa Janti sebagai sampel kategori BUMDes berkembang dengan pertimbangan sumber daya alam yang sama, masih dalam satu lokasi (satu Kecamatan). Hasilnya menunjukkan bahwa pada dua sampel bumdes menunjukkan perkembangan yang berbeda di mana sampel yang pertama BUMDes berhasil berkembang pesat dan

meningkatkan keadaan perekonomian desa yang tak lepas dari campur tangan masyarakat dan pengurus BUMDes yang di komandoi langsung oleh kepala desanya sendiri. Kepala desa berhasil menciptakan kolaborasi yang baik antara masyarakat dan pihak swasta yang menjadi pendukung dalam pengembangan dan pengelolaan BUMDes. Berbeda dengan sampel BUMDes yang pertama, sampel BUMDes yang kedua ini justru mengalami banyak kendala diantaranya yaitu lemahnya komunikasi dan kolaborasi yang terjadi antara pihak pemerintah, masyarakat dan swasta sehingga BUMDes yang dikelola belum berkembang sesuai dengan tujuan dibentuknya.

4. Naufal Alfarisi, Rachmawati Novaria dan Supri Hartono (2022) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul "*Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Sedayulawas Dengan Pendekatan Collaborative Governance*" yang fokus penelitiannya akan mengarah pada tata kelola yang akan dijalankan pada BUMDes dengan menggunakan pendekatan *Collaborative Governance*. Hasil dari penelitian ini membuktikan pendekatan *collaborative governance*, membuka akses keterlibatan sektor non state (lembaga masyarakat dan masyarakat desa) dalam pengambilan keputusan pengelolaan BUMDes di Desa Sedayulawas. Proses kolaboratif ini juga mendorong pemerintah desa mengeluarkan program yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan dan

pemberdayaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, akuntabel dan transparan. Dalam pengelolaan BUMDes Desa Sedayulawas dengan hasil penelitian membuktikan bahwa proses tata kelola kolaboratif sudah terlaksana, dibuktikan dengan adanya kerja sama dari pemangku kebijakan yang saling mendukung, tetapi belum berhasil sepenuhnya karena kriteria keberhasilan yakni pembagian akuntabilitas masih terfokus pada pemerintah desa dan akses terhadap sumber daya utamanya fasilitas dan keuangan masih sangat terbatas dan menjadi factor penghambat kolaborasi.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, terdapat persamaan dalam setiap penelitian penggunaan konsep pendekatan atau teori pendukung. Penelitian tersebut sama-sama menggunakan konsep pendekatan *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash yang fokus pada pembangunan pedesaan khususnya dibidang perekonomian melalui program Badan Usaha Milik Desa dengan menerapkan konsep kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam pelaksanaan programnya. Perbedaan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada lokasi penelitian, permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan BUMDes dan aktor-aktor yang terlibat dalam program BUMDes.

2.2. Collaborative governance

Pengertian *governance* merupakan 'diseminasi otoritas' dari *single actor* menjadi multi-aktor. Konsep *governance* di bagi menjadi beberapa urusan publik yang sebelumnya telah dikelola oleh aktor tunggal yaitu pemerintah menjadi dikelola bersama dengan aktor lain seperti dari sektor swasta serta masyarakat. Dengan adanya *governance* menjadikan pemerintah tidak lagi dominan dalam menciptakan demokrasi untuk penyelenggaraan pemerintahan serta urusan-urusan publik lainnya. Terdapat beberapa aktor yang berpengaruh dalam proses *governance* diantaranya Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Ketiga aktor tersebut saling berkerjasama dalam suatu proses penyelenggaraan pemerintahan. Pihak pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal yang mampu memonopoli penyelenggaraan pemerintahan, melainkan memerlukan bantuan dari aktor atau pihak lain karena adanya keterbatasan kemampuan pemerintah. Swasta dengan dukungan finansialnya harus mampu membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun tidak diperbolehkan untuk mengurus kepentingan pribadinya dan hanya mencari keuntungan saja. Sedangkan penguatan partisipasi masyarakat desa merupakan suatu yang harus ditempuh dalam rangka mendukung dan membangun pembaharuan bagi desa itu sendiri, karena pada dasarnya faktor yang paling mempengaruhi dalam memperkuat gerak pembaharuan desa terletak pada tingkat partisipasi masyarakat setempat.

Collaborative Governance merupakan konsep dalam suatu manajemen pemerintahan yang dijadikan sebagai proses fasilitasi dan pelaksanaan oleh berbagai institusi baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah secara bersama dan tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja. Menurut Ansell dan Gash: *Collaborative Governance* sebagai sebuah pengaturan yang mengatur di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, dan ada pembagian peran serta bertujuan untuk menetapkan atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola program pemerintah atau aset publik.⁴ Berikut ini merupakan model proses kolaborasi yang buat oleh Ansell dan Gash:

a. *Face to face dialogue* (Dialog Tatap Muka)

Semua bentuk *collaborative governance* dibangun dari dialog tatap muka secara langsung dari setiap *stakeholder* yang terlibat. Sebagaimana *collaborative governance* yang berorientasikan proses, dialog secara langsung sangat penting dalam rangka mengidentifikasi peluang dan keuntungan bersama. Dialog secara tatap muka langsung bukanlah semata-mata merupakan negoisasi yang alakadarnya. Dialog secara langsung ini dapat meminimalisir antagonisme dan disrespect dari antar *stakeholder* yang

⁴ La Ode Syaiful Islamy H., *Collaborative Governance Konsep Dan Aplikasi* (Baubau: Deepublish, 2018), Hal. 81.

terlibat. Sehingga mereka dapat bekerjasama sesuai dengan tujuan dan kebermanfaatan bersama.

b. *Trust Building* (Membangun Kepercayaan)

Buruknya rasa percaya antar *stakeholder* memang merupakan hal yang lumrah di awal proses kolaborasi. Kolaborasi memang bukan semata tentang negoisasi antar *stakeholder*, namun lebih dari itu merupakan upaya untuk saling membangun kepercayaan satu dengan yang lainnya. Membangun kepercayaan perlu dilakukan sesegera mungkin ketika proses kolaborasi pertama dilakukan. Hal itu diupayakan agar para *stakeholder* tidak mengalami egosentrisme antar institusi. Oleh karenanya, dalam membangun kepercayaan ini, diperlukan pemimpin yang mampu menyadari akan pentingnya kolaborasi.

c. *Commitment to the process* (Komitmen Terhadap Proses)

Komitmen tentunya memiliki relasi yang kuat dalam proses kolaborasi. Komitmen merupakan motivasi untuk terlibat atau berpartisipasi dalam *collaborative governance*. Komitmen yang kuat dari setiap *stakeholder* diperlukan untuk mencegah resiko dari proses kolaborasi. Meskipun komitmen memang merupakan hal yang rumit dalam kolaborasi. Komitmen merupakan tanggung jawab dari *stakeholder* supaya memandang relasi yang dilakukan sebagai hal yang baru dan tanggungjawab tersebut perlu dikembangkan.

d. *Shared Understanding* (Pemahaman Bersama)

Pada poin yang sama dalam proses kolaborasi, *stakeholder* yang terlibat harus saling berbagi pemahaman mengenai apa yang dapat mereka capai melalui kolaborasi yang dilakukan. Saling berbagi pemahaman ini dapat digambarkan sebagai misi bersama, tujuan bersama, objektivitas umum, Visi bersama, ideologi yang sama, dan lain-lain. saling berbagi pemahaman dapat berimplikasi terhadap kesepakatan bersama untuk memaknai dan mengartikan suatu masalah.

e. *Intermediate Outcomes* (Hasil Sementara)

Hasil lanjutan dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk output atau keluaran yang nyata. Hal ini merupakan hasil proses yang kritis dan esensial dalam mengembangkan momentum yang dapat membimbing demi keberhasilan suatu kolaborasi. *Intermediate outcomes* ini muncul apabila tujuan yang mungkin dan memberikan keuntungan dari kolaborasi yang mana secara relative konkrit dan ketika "*small wins*" dari suatu kolaborasi dapat dimungkinkan terjadi.

Melibatkan beragam *stakeholder* dapat juga diartikan sebagai bentuk bekerja bersama atau bekerja sama dengan orang lain. Baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan individu yang saling bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Kerjasama sebagai strategi baru dari pemerintahan yang disebut sebagai *collaboration*

governance yaitu bentuk *governance* yang melibatkan berbagai *stakeholder* atau pemangku kepentingan secara bersamaan di dalam sebuah forum dengan aparaturnya pemerintah untuk membuat keputusan bersama. Kebutuhan akan kerjasama tersebut dilandasi dari rasa sesali ketergantungan dari masing-masing pihak pemangku kepentingan. Dengan adanya rasa saling ketergantungan maka terjadilah sebuah kesepakatan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama di mana yang akan saling menguntungkan masing-masing pihak. Dengan begitu tujuan dari masing-masing pihak akan tercapai. *Collaborative governance* berguna untuk memecahkan permasalahan secara bersama-sama dari pihak yang terlibat. Siap tersebut tidak hanya sebatas pada instansi pemerintahan dan non pemerintahan karena prinsip tata kelola pemerintahan yang baik adalah melibatkan masyarakat sipil dalam perumusan dan pengambilan keputusan. Setiap *stakeholder* memiliki kedudukan yang sama dalam mencapai sebuah tujuan walaupun kepentingan dari masing-masing pihak berbeda.

Menurut Emerson, Nabatchi dan Balogh menyatakan bahwa proses dan struktur kebijakan publik dalam membuat keputusan dan manajemen mengikutsertakan orang secara konstruktif dan melewati batasan-batasan lembaga publik, tingkat pemerintahan, dan/atau publik, swasta dan lingkungan kewarganegaraan. Hal ini tidak membatasi *collaborative governance* untuk hanya melibatkan pemerintah dan aktor *non-state* (bukan pemerintah) dan bisa juga dalam bentuk kerjasama antar pemerintah atau *multi-partner governance*. *Collaborative Governance* juga memungkinkan

adanya keterlibatan atau partisipasi *civil society* dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁵

Berdasarkan paparan beberapa definisi konseptual menurut para ahli tentang *collaborative governance* diatas maka dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* merupakan suatu proses kerjasama atau kolaborasi dimana didalamnya terdapat adanya keterlibatan *state actor* (pemerintah) dan *non-state actor* (swasta, lembaga masyarakat ataupun institusi non-pemerintah lainnya) yang masing-masing memiliki kepentingan dalam sebuah proses pembuatan kebijakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

3.2. Pembangunan Ekonomi Pedesaan

Pembangunan desa merupakan suatu proses perubahan yang berusaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self reliance* atau kemandirian. Dalam proses ini masyarakat desa dibantu, didampingi dan difasilitasi untuk melakukan analisis terhadap masalah yang dihadapi, untuk menemukan solusi masalah tersebut dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, menciptakan aktivitas dengan kemampuannya sendiri. Dengan pendekatan semacam ini, masyarakat desa diberi peluang memutuskan apa yang dikehendaki, dan inisiatif mereka kemudian menjadi basis program-program pembangunan pedesaan.

Pembangunan Desa juga bisa diartikan sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan guna sebesar-besarnya

⁵ Intan Margaretha Triaryanti, "*Collaborative Governance Dalam Pengelolaan BUMDes di Desa Wisata Pojon Kidul Kabupaten Malang*" (Surabaya: Perpustakaan Universitas Airlangga, 2021), Hal. 40

kesejahteraan masyarakat desa. Hal demikian dijelaskan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014. Dalam penyelenggaraan pembangunan desa penting untuk mengutamakan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong guna mencapai perdamaian dan keadilan sosial, sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 78 (3). Peran masyarakat atau yang diwakili oleh lembaga tertentu memiliki pengaruh yang sangat penting dalam pembangunan, karena masyarakat merupakan sumber informasi utama mengenai kebutuhan dan kondisi yang mereka hadapi, kemudian partisipasi dari masyarakat akan menimbulkan anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Membangun ekonomi desa adalah memandirikan ekonomi desa. Masyarakat desa bisa sejahtera dan pemerintahan desa bisa menjadi pelayanan dan penggerak ekonomi desa. Menurut Lincolin Arsyad, pembangunan ekonomi pedesaan merupakan suatu proses dimana pemerintah desa dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah desa dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) di wilayah tersebut.

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi pedesaan adalah untuk menciptakan suatu lingkungan ekonomi desa yakni untuk menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakatnya dapat menikmati kehidupan

yang kreatif, sehat dan juga memiliki angka harapan hidup yang tinggi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, terdapat prinsip-prinsip pembangunan ekonomi pedesaan, yang meliputi: (1) transparansi (keterbukaan) yang harus ada transparansi dalam hal pengelolaan pembangunan, termasuk dalam hal pendanaan, pemilihan kader, pembangunan sistem, pelaksanaan program, dan lain sebagainya, (2) partisipasi yang membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat desa, (3) Dapat dinikmati Masyarakat yang Sasaran dalam pembangunan ekonomi harus sesuai sehingga hasilnya bisa dinikmati oleh keseluruhan masyarakat, (4) Dapat Dipertanggungjawabkan (akuntabilitas) biasa juga disebut proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan harus bisa dipertanggungjawabkan, dalam arti tidak terjadi penyimpangan, (5) Berkelanjutan (sustainable) atau program yang dirancang harus dapat berlangsung secara terus menerus atau berkelanjutan, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat desa berlangsung permanen, dan bukan hanya pada satu waktu saja.

Konsep pembangunan ekonomi desa harus benar-benar bertumpu pada kekuatan masyarakat desa. Potensi yang dimiliki oleh desa harus benar-benar menjadi akar dalam pembangunan ekonomi Desa. Potensi sumber daya alam dan manusia yang ada di desa harus menjadi sumber kekuatan dalam membangun ekonomi desa. Pentingnya pengelolaan ekonomi desa menjadi hal yang menunjang dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, yaitu dalam hal

pengelolaan potensi yang dimiliki masyarakat maupun pengelolaan sumber daya alam yang ada di dalam desa tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mendorong mobilisasi ekonomi Desa melalui kewirausahaan Desa, kewirausahaan Desa ini dapat diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sendiri merupakan suatu badan usaha yang semua ataupun sebagian dari modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

4.2. Kerangka Berpikir

Kolaborasi dipahami sebagai kerja sama antar aktor, antar organisasi atau antar institusi dalam rangka pencapaian tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan secara independent. Dalam hal ini yang dimaksud adalah *collaborative governance* pemerintah Desa Bakaru dengan masyarakat serta pihak swasta dalam peningkatan ekonomi desa melalui program BUMDes.

Pembangunan ekonomi desa menggunakan pendekatan *collaborative governance* dalam program BUMDes akan melibatkan *stakeholder* diantaranya ada pemerintah, masyarakat dan swasta. Program BUMDes muncul dari pihak pemerintah desa yang dalam upaya pelaksanaan programnya pemerintah akan turun kemasyarakat dalam hal permintaan persetujuan, inovasi program dan menjalin Kerjasama. Setelah terjalinnya komunikasi yang baik antara pihak pemerintah dan masyarakat maka langkah selanjutnya yaitu pemerintah akan mencari pihak swasta berdasarkan inovasi sebagai penyedia alat kebutuhan program kerja BUMDes yang tidak dimiliki oleh desa. Tersedianya alat kebutuhan program maka lanjut pada proses pemasangan dan pengoprasian yang melibatkan komunikasi secara langsung antara masyarakat dengan pihak swasta. Dengan demikian kolaborasi antara tiga aktor akan saling berkaitan dan bekerjasama.

Dalam penelitian ini menggunakan proses kolaborasi menurut Ansell dan Gash yang dianggap sesuai dengan kondisi yang terjadi dilokasi penelitian. Dimana terdapat lima proses dalam melakukan kolaborasi

diantaranya: Dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman Bersama dan hasil sementara.⁶

Proses pertama yang dilakukan dalam *collaborative governance* yaitu melakukan dialog tatap muka secara langsung dari setiap *stakeholder* yang terlibat guna melakukan negosiasi membahas identifikasi peluang dan keuntungan Bersama dalam pengelolaan BUMDes. Setelah terjadinya negosiasi antara *stakeholder* maka selanjutnya yang perlu di bangun yaitu rasa saling percaya guna menghindari perilaku egosintisme antar *stakeholder* dan membutuhkan peran seorang aktor desa sebagai pimpinan. Proses selanjutnya yaitu komitmen sebagai tanggungjawab *stakeholder* agar kiranya relasi yang terjalin membentuk inovasi baru dan perlu dikembangkan dalam pengelolaan BUMDes. Pada poin yang sama dalam proses kolaborasi, *stakeholder* yang terlibat harus saling berbagi pemahaman mengenai apa yang dapat mereka capai melalui kolaborasi yang dilakukan. Saling berbagi pemahaman ini dapat digambarkan sebagai misi bersama, tujuan bersama, objektivitas umum, visi bersama, ideologi yang sama, dan lain-lain. Dengan tahapan proses tersebut maka akan ada hasil sementara sebagai hasil pertama. Hasil tersebut bisa berupa data hasil peningkatan perekonomian desa.

⁶ La Ode Syaiful Islamy H., *Collaborative Governance Konsep Dan Aplikasi* (Baubau: Deepublish, 2018), Hal. 82

4.2. Sekma Pikir

